

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik dapat menyebabkan krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang kemudian dapat mengarah pada reformasi. Salah satu bentuk dari reformasi yang terjadi di Indonesia adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah telah terjadi beberapa kali perubahan pada Undang Undang tentang pemerintah daerah yang telah ada pada awal diberlakukannya otonomi daerah. Dimulai dari UU No 22 tahun 1999 yang diganti dengan UU No 32 tahun 2004, kemudian UU ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan. Kemudian UU No 32 tahun 2004 tersebut dilakukan direvisi dengan UU No 23 tahun 2014 dan telah dilakukan perubahan dalam Perpu No 2 tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Menurut Ramandei (2009) kebijakan otonomi daerah ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Tujuan dari otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk memicu pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan

prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya guna potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu dan dinamis serta bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan pemerintah daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah (Bastian,2001).

Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat, diantaranya adalah pertama, mendorong peningkatan partisipasi,prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang mempunyai informasi yang lebih lengkap (Mardiasmo, 2004).

Pelimpahan wewenang ini menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri, dimana pemerintah daerah dituntut dapat menggali potensi daerahnya sendiri sebagai sumber penerimaan daerah dan juga dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan pemerintahannya. Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.

Dengan adanya otonomi dan desentralisasi tersebut, daerah wajib memenuhi azas umum pengelolaan keuangan sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu, “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

ekonomis,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Pemenuhan dari prinsip pengelolaan keuangan secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dapat dilihat dari kewajiban penyusunan APBD, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemenuhan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dapat dilihat dengan adanya situs resmi pemerintah yang menyediakan berbagai informasi mengenai target dan realisasi APBD daerah tersebut. Sedangkan pemenuhan kewajiban pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, dan ekonomis, memerlukan suatu analisis dengan indikator tertentu yang dapat mengukur kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan ini juga untuk melihat kemandirian keuangan daerah, keberhasilan daerah dalam meningkatkan PAD-nya, dan peran PAD tersebut dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan otonomi disuatu daerah.

Cara untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya (Halim, 2007). Analisis dilakukan terhadap APBD dikarenakan APBD merupakan standar, acuan, dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, sehingga

semua aspek pengelolaan keuangan dari daerah tersebut tergambar dalam APBD. Hasil analisis rasio keuangan dapat dipergunakan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah tersebut.

Saat ini pelaksanaan desentralisasi hampir merata di seluruh wilayah negara Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan desentralisasi. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki banyak potensi alam, potensi sektor wisata, maupun potensi-potensi dari sektor lainnya dari berbagai kota dan kabupaten yang ada. Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi pada beberapa tahun belakangan. Hal tersebut didorong membaiknya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi di kawasan Sumatera sejak triwulan IV 2015. Peningkatan perekonomian tersebut juga didukung oleh sektor pariwisata yang saat menjadi salah satu sektor vital bagi Provinsi Sumatera Barat, terlebih lagi ada tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat dinobatkan sebagai provinsi wisata halal terbaik di dunia pada ajang World Halal Tourism Award 2016. Prestasi tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu tujuan destinasi wisata kuliner oleh turis dalam negeri maupun mancanegara. Prestasi yang diraih oleh provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peranan Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, dimana kota-kota tersebut merupakan salah satu kota wisata kuliner terbaik yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh juga merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan tertinggi di Sumatera Barat.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi pendapatan utama berasal dari sektor pariwisata dan sektor perdagangan. Bukittinggi merupakan tujuan destinasi wisata yang banyak dituju oleh masyarakat, baik masyarakat dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi. Kota ini juga merupakan pusat perdagangan grosir terbesar di pulau Sumatera karena terdapatnya pasar grosir Aur Kuning yang merupakan salah satu pasar grosir terbesar di Indonesia. Pendapatan dari beberapa sektor tersebut turut memberi andil dalam peningkatan perekonomian di Kota Bukittinggi. Sementara itu Kota Payakumbuh sebagai kota persinggahan menjadikan sektor pariwisata dan perdagangan menjadi sektor andalan, namun sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan perikanan masih menjanjikan bagi masyarakat di kota ini. Kota Payakumbuh merupakan kota persinggahan bagi orang-orang yang bepergian menuju kota-kota penting di Sumatera Barat dan Riau sehingga sektor perdagangan kota ini sangat berkembang dan juga terdapat tempat wisata lembah harau yang ramai didatangi masyarakat dari dalam maupun luar provinsi. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah-daerah ini pun dari tahun ke tahun semakin meningkat dan ini mendorong terjadinya peningkatan kinerja pemerintah kota di masing masing kota tersebut. Peningkatan PAD wilayah tersebut diiringi dengan pemaksimalan potensi sumber daya daerah, pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, penulis berminat untuk menganalisa perkembangan kinerja keuangan Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dan memberi judul skripsi ini dengan **“Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan antara Pemerintah Kota di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh tahun 2011-2014”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kota Bukittinggi tahun 2011-2014 berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Kota Payakumbuh tahun 2011-2014 berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?
3. Bagaimana perbandingan kinerja antara Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kinerja keuangan daerah Kota Bukittinggi berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.
2. Untuk menjelaskan kinerja keuangan daerah Kota Payakumbuh berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.
3. Untuk menjelaskan perbandingan kinerja keuangan antara Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait kinerja keuangan daerah Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dan mengkorelasikannya dengan konsep-konsep yang telah dipelajari diperkuliahserta sebagai syarat penyelesaian pendidikan S1 pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bagi instansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan perbandingan, dan acuan dalam rangka upaya

peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh khususnya, dan untuk kabupaten dan/atau kota lain pada umumnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pada penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat umum, dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terbatas pada perbandingan tingkat kemandirian keuangan daerah, efektifitas penerimaan PAD, pertumbuhan (*growth*) penerimaan PAD, dan peran (*share*) PAD terhadap belanja daerah antara Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh berdasarkan data APBD dan realisasi APBD tahun 2011-2014.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

- a. Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Disini dijelaskan mengapa perlu untuk melakukan penilaian kinerja keuangan daerah, dan mengapa penulis memilih Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh untuk diteliti.
- b. Bab II, berisi tentang teori teori dan definisi yang menjadi dasar perhitungan dan analisis dalam penelitian ini. Disini juga dijelaskan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

- c. Bab III, berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- d. Bab IV, berisi tentang hasil pengolahan data dan pembahasan.
- e. Bab V, bagian penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

